

Emansipasi pendidikan yang belum terwujud di masyarakat

Anissa

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : 250104110061@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Emansipasi; pendidikan;
kualitas pendidikan;
ekonomi; Indonesia.

Keywords:

Emancipation; education;
quality of education;
economy; Indonesia.

ABSTRAK

Pendidikan memiliki peran strategis sebagai instrumen emansipasi sosial yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari ketertinggalan, kemiskinan, dan ketimpangan struktural. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa emansipasi pendidikan belum sepenuhnya terwujud di seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan emansipasi pendidikan belum terwujud di masyarakat Indonesia serta menganalisis dampak kondisi tersebut terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan pengamatan terhadap fenomena pendidikan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terwujudnya emansipasi pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan akses pendidikan akibat keterbatasan infrastruktur dan geografis, hambatan sosial-ekonomi keluarga, ketidakmerataan kualitas dan distribusi tenaga pendidik, lemahnya implementasi kebijakan pendidikan, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Selain itu, kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya mobilitas sosial, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya peluang kerja, meningkatnya kesenjangan sosial, serta melemahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan demokratis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa emansipasi pendidikan belum terwujud secara substantif dan memerlukan upaya kebijakan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan agar pendidikan benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

Education has a strategic role as an instrument of social emancipation that aims to free society from backwardness, poverty, and structural inequality. However, the reality in Indonesia shows that the emancipation of education has not been fully realized at all levels of society. This study aims to examine the factors that cause the emancipation of education to not be realized in Indonesian society and analyze the impact of these conditions on the social and economic life of the community. This study uses a descriptive qualitative approach with the method of literature study and observation of educational phenomena in the community. The results of the study show that the lack of education emancipation is influenced by various factors, including inequality of access to education due to infrastructure and geographical limitations, family socio-economic barriers, uneven quality and distribution of educators, weak implementation of education policies, and socio-cultural factors that affect public perception of the importance of education. In addition, these conditions have an impact on the inhibition of social mobility, the low quality of human resources, limited employment opportunities, increasing social inequality, and weakening of community participation in social and democratic life. Thus, this study emphasizes that educational emancipation has not been substantively realized and requires more inclusive, contextual, and equitable policy efforts so that education can truly function as a means of community empowerment.



Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan manusia karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana pewarisan pengetahuan, tetapi juga sebagai medium pembentukan potensi dan keberagaman kecerdasan individu. Dalam konteks ini, pendidikan idealnya diarahkan pada pengembangan seluruh kemampuan peserta didik secara holistik, bukan sekadar capaian akademik semata, sebagaimana ditekankan dalam paradigma sekolah unggul berbasis Multiple Intelligences yang menempatkan keunikan dan potensi setiap individu sebagai pusat proses pendidikan (Kawakip, 2011). Dengan pendekatan tersebut, pendidikan berperan sebagai alat emansipasi sosial yang membuka akses keadilan dan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup serta berpartisipasi aktif dalam ranah sosial dan ekonomi. Namun demikian, praktik emansipasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama pada kelompok masyarakat marginal, berpenghasilan rendah, dan wilayah pedesaan, sehingga tujuan pendidikan sebagai pemutus rantai kemiskinan belum sepenuhnya terealisasi.

Satu dari banyak indikator yang tidak terwujud dalam definisi dimansipasi pendidikan adalah akses serta kualitas pendidikan dalam konteks pedesaan dan perkotaan. Penelitian mengenai disparitas pendidikan Indonesia menunjukkan betapa terkenalnya disparitas ini. Hal ini terlihat dari perbedaan pada kesempatan, kuantitas, kualitas fasilitas, dan bahkan hasil dalam pendidikan yang berada antara lembaga pendidikan di kota besar dengan yang berada di kota kecil, terpinggirkan, atau daerah pedesaan (R.Madhakomala et al., 2025). Kajian terhadap tantangan dan kebijakan pendidikan dalam konteks Indonesia tidak dapat dan tidak bisa dipisahkan dari disparitas akses, kualitas pendidikan, serta ketimpangan dalam pendidikan yang dirasakan dan dihadapi oleh anak-anak yang dalam konteks pedesaan, yang tidak dialami oleh anak-anak dalam konteks perkotaan (Annet, 2024). Terdapat kendala seperti infrastruktur pendidikan, buta huruf digital di daerah yang tertinggal, serta ketidakmerataan distribusi tenaga pengajar.

Keterbatasan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam peningkatan kualitas pendidikan di wilayah pedesaan. Banyak sekolah di daerah pedesaan beroperasi dengan fasilitas yang tidak memadai, seperti keterbatasan listrik, ventilasi ruang belajar, kualitas udara, serta akses internet, yang berdampak langsung pada efektivitas proses pembelajaran (Wirawati et al., 2024). Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sosial dan geografis pedesaan yang ditandai oleh keterbatasan akses transportasi dan ketimpangan pembangunan antarwilayah, sebagaimana dijelaskan dalam kajian perubahan sosial masyarakat pedesaan yang menyoroti relasi antara struktur sosial, ruang, dan akses layanan publik (Rahardjo, 2007). Akibatnya, hambatan geografis dan minimnya infrastruktur turut berkontribusi pada tingginya angka ketidakhadiran peserta didik dan putus sekolah. Situasi ini semakin kompleks ketika ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi profesional masih terbatas, sehingga memperlemah daya dukung pendidikan di daerah dengan tantangan geografis yang tinggi (Annet, 2024).

Secara sosial ekonomi, keluarga berpenghasilan rendah lebih banyak menghadapi tantangan yang membuat emansipasi pendidikan semakin sulit terwujud. Biaya pendidikan tidak langsung seperti transportasi, buku, seragam, dan perlengkapan sekolah merupakan beban yang mahal bagi keluarga miskin. Ketika biaya-biaya ini menjadi tidak terkendali, anak-anak dari keluarga miskin terpaksa absen, mengalami keterlambatan pendidikan, atau putus sekolah sama sekali. Situasi ini juga mengajarkan kita bahwa meskipun pendidikan adalah hak dasar, masih ada beberapa kelompok sosial yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengaksesnya (Yulianingsih, 2024). Lebih lanjut, ketidaksetaraan ini diperparah oleh kesenjangan digital yang muncul di era pandemi pendidikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yaitu COVID-19. Kebijakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi mendorong penggunaan teknologi pendidikan tetapi juga menciptakan kesenjangan baru. Siswa perkotaan lebih siap dengan akses internet dan perangkat digital, sementara siswa pedesaan tertinggal dengan infrastruktur digital yang terbatas (Zani & Rahayu, 2022). Hal ini menciptakan situasi di mana teknologi yang seharusnya memberdayakan siswa-siswa ini justru meningkatkan kesenjangan dalam akses pendidikan.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah berupaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai reformasi kebijakan. Inisiatif seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Cerdas (PIP) telah dirancang untuk memberikan bantuan keuangan kepada siswa guna meringankan beban biaya pendidikan. Namun, studi menunjukkan bahwa efektivitas berbagai program ini masih jauh dari ideal karena dampak distribusi sumber daya yang tidak merata, hierarki yang rumit, dan dukungan dari bawah ke atas yang tidak konsisten selama implementasi (Mughtar et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa, terlepas dari kebijakan pendidikan yang ada, potensi mereka untuk memberikan kesempatan pendidikan secara lebih adil, salah satu manifestasi yang mungkin dari emansipasi Pendidikan masih sangat terbatas.

Dari perspektif ketidaksetaraan pendidikan, pendidikan juga berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial yang memungkinkan individu untuk melepaskan diri dari struktur status yang kurang beruntung dan mencapai tingkatan sosial yang lebih menguntungkan. Ketika akses pendidikan tidak merata, pendidikan itu sendiri yang memperlebar jurang pemisah; mereka yang memiliki modal sosial dan ekonomi yang lebih besar mampu mengadvokasi dan memanfaatkan peluang pendidikan, sementara kelompok-kelompok yang terpinggirkan tertinggal, sehingga memperlebar jurang pemisah (Zaidah & Parozak, 2025). Hal ini memperkuat posisi kelompok yang beruntung dan melemahkan peluang kelompok yang kurang beruntung untuk meningkatkan status sosial mereka.

Ketidaksetaraan pendidikan juga berdampak pada kualitas pembelajaran yang ditawarkan. Bukti menunjukkan bahwa di sejumlah sekolah dasar pedesaan, kualitas pengajaran dan pembelajaran yang terjadi masih sangat buruk karena kurangnya sumber daya, kurangnya kesempatan pengembangan profesional, dan kurangnya. Kondisi ini tidak hanya mengganggu proses emansipasi pendidikan tetapi juga berpotensi memperkuat siklus ketidaksetaraan antar generasi (ShepnaGiantama et al.,

2024). Namun, tantangan-tantangan ini telah mendorong diusulkannya solusi alternatif. Beberapa solusi yang diusulkan meliputi distribusi guru yang lebih merata ke daerah terpencil, infrastruktur yang lebih kuat baik digital maupun fisik di sekolah, dan penciptaan program pembelajaran kontekstual dan relevan yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat setempat, dan sektor swasta juga dianggap penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Annet, 2024).

Dalam hal ini, masalah yang muncul adalah meskipun pendidikan dipandang sebagai sarana emansipasi sosial, pelaksanaannya masih jauh dari ideal di banyak komunitas sosial. Ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan menunjukkan bahwa komunitas tertentu belum mampu menikmati pendidikan secara horizontal, dan bagaimana faktor struktural dan kontekstual memengaruhi terwujudnya emansipasi pendidikan merupakan isu yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, studi ini berfokus pada kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang menghambat emansipasi pendidikan dalam masyarakat dan dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dalam upaya memberikan perspektif holistik mengenai isu ini di Indonesia saat ini.

Pembahasan

Faktor yang Menyebabkan Emansipasi Pendidikan Belum Terwujud di Masyarakat Indonesia

Dalam konteks hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan, pendidikan bukan hanya akses ke sistem pendidikan formal atau sekolah, tetapi juga sebuah proses yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik serta mengatasi ketidakseimbangan yang telah tertanam secara struktural dalam masyarakat. Namun, realitas pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa proses emansipasi pendidikan belum sepenuhnya diperoleh oleh setiap lapisan masyarakat. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, baik dalam kualitas, kesempatan, maupun sumber daya, masih menjadi tantangan utama yang menghambat pendidikan mencapai tujuannya menjadi sarana pemberdayaan yang efektif.

Banyak penelitian, laporan, dokumen akademis, dan data nasional menunjukkan bahwa kesenjangan dalam ketidaksetaraan pendidikan masih terus melebar, meskipun tidak merata antara daerah pedesaan dan perkotaan, serta antara strata sosial ekonomi yang berbeda. Misalnya, data dari BPS mengungkapkan bahwa persentase penduduk pedesaan yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah jauh lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di daerah perkotaan, yang menggambarkan kesenjangan dalam akses pendidikan (Khatami, 2025). Kesenjangan tersebut juga mencakup kualitas pendidikan, tingkat infrastruktur, dan kemampuan finansial orang tua dalam mendukung pendidikan formal anak-anak. Situasi ini menciptakan hambatan sistemik, yang menghalangi pendidikan menjadi jalan keluar yang sepenuhnya efektif dari siklus kemiskinan dan kekurangan sosial bagi kaum kurang mampu (Susanto et al., 2025). Dalam konteks ini, emansipasi pendidikan tetap menjadi cita-cita konseptual,

dan ini disebabkan oleh adanya banyak faktor struktural, ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terkait yang memperkuat ketidaksetaraan yang ada selama proses pendidikan.

Infrastruktur dan Hambatan Geografis serta Ketidakadilan Akses Pendidikan

Akses pendidikan yang terkait dengan infrastruktur dan geografis merupakan salah satu tantangan penting dalam pencapaian pendidikan yang memerdekakan. Sebagai negara kepulauan dengan geografi yang rumit, Indonesia memiliki banyak daerah terpencil yang sulit diakses dan kurang mendapatkan pelayanan pendidikan (Wirawati et al., 2024). Sekolah-sekolah di daerah seperti itu cenderung kekurangan fasilitas dasar seperti listrik, internet, dan transportasi yang memadai, yang mengakibatkan terganggunya proses pendidikan dan membuat siswa semakin sulit untuk terlibat dalam Pendidikan (Putri, 2024). Selain itu, ketidakseimbangan digital, dalam konteks penggunaan internet yang tidak teratur dan luas untuk pembelajaran jarak jauh, telah menjadi hambatan signifikan dalam sebagian besar inisiatif pembelajaran jarak jauh di Australia. Misalnya, dibandingkan dengan siswa jarak jauh, siswa perkotaan yang memiliki sumber daya digital dan akses internet yang memadai dengan mudah beralih ke pembelajaran jarak jauh.

Implikasi emansipasi pendidikannya adalah Akses yang terbatas terhadap sumber daya pendidikan fisik dan digital membatasi potensi pendidikan yang memerdekakan dan menutup akses yang adil terhadap pendidikan untuk komunitas yang terpinggirkan tertentu. Oleh karena itu, jarak pendidikan belum tercapai.

Hambatan Sosial Ekonomi dan Keluarga Berpenghasilan Rendah

Faktor-faktor sosial ekonomi merupakan salah satu alasan utama mengapa pembiayaan pendidikan tetap tidak terpenuhi di banyak komunitas. Keluarga selimut rendah sering menanggung beban biaya tidak langsung pendidikan seperti biaya seragam, buku, bahan tulis, dan bahkan kebutuhan transportasi yang seringkali tidak terjangkau oleh keluarga miskin. Ketika biaya-biaya ini menjadi beban yang signifikan, banyak siswa terpaksa absen, tidak rutin bersekolah, atau bahkan putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga (John, 2025). Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang rendah juga membuat anak-anak cenderung terlibat dalam pekerja anak atau kegiatan ekonomi informal sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Aktivitas ini mengurangi waktu yang tersedia untuk belajar dan mengurangi motivasi untuk tetap bersekolah, sehingga pendidikan sebagai hak dasar terabaikan bagi mereka yang secara ekonomi tidak berdaya.

Implikasi emansipasi bagi pendidikan juga jelas yaitu pendidikan bukan hanya tentang sekolah sebagai institusi, tetapi juga tentang kemampuan ekonomi keluarga untuk memungkinkan anak berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan. Ketika ekonomi ditekankan, pendidikan menjadi pilihan sekunder, sehingga pendidikan yang memerdekakan sebagai hak universal belum tercapai sepenuhnya.

Distribusi dan Kualitas Guru

Ketimpangan distribusi guru dan variasi kualitas pengajaran masih menjadi kendala signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan

dan daerah terpencil. Keterbatasan jumlah pendidik yang berkualitas di wilayah tersebut tidak terlepas dari kecenderungan guru untuk memilih bertugas di kawasan perkotaan yang menawarkan fasilitas dan dukungan kerja yang lebih memadai, sehingga sekolah-sekolah terpencil sering menghadapi kondisi di mana satu guru harus menangani beberapa mata pelajaran dengan beban kerja yang tinggi tanpa dukungan pengembangan profesional yang berkelanjutan (Wirawati et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, (Izzati et al., 2025) menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan sangat bergantung pada akses terhadap pelatihan yang sistematis, kesejahteraan yang memadai, serta kebijakan pengembangan profesional yang konsisten. Ketika pelatihan dan pendampingan profesional tidak tersedia secara merata, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan insentif, proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan berdampak pada rendahnya kualitas hasil belajar peserta didik.

Implikasi bagi emansipasi Pendidikan adalah Semakin tidak adil distribusi dan akses terhadap tenaga pengajar yang berkualitas, semakin tidak adil pula hasil pendidikan. Akibatnya, anak-anak di daerah yang memiliki staf pengajar berkualitas rendah mengalami kekurangan dalam belajar, sehingga menghambat peluang pendidikan mereka untuk memberdayakan mereka keluar dari marginalisasi sosial ekonomi.

Ketidakefektifan Implementasi Kebijakan dan Distribusi Bantuan Pendidikan

Di Indonesia, sudah ada beberapa kebijakan afirmatif seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah. Namun, terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini seringkali mengatasi masalah. Kebijakan-kebijakan ini menangani masalah terkait distribusi, verifikasi data, dan birokrasi yang berbelit-belit, yang mengakibatkan bantuan yang diberikan kurang tepat sasaran. Apalagi ketika bantuan diberikan kepada seseorang, tertundanya distribusi bantuan/sosialisasi yang tidak memadai berdampak pada keluarga yang benar-benar membutuhkan (Danurwendo & Haryanto, 2025). Selain itu, banyak kebijakan ini masih gagal dan tidak melibatkan penerima manfaat lokal dalam pengambilan keputusan, karena implementasi perbaikan itu tidak peka terhadap konteks lokal dan kebutuhan nyata masyarakat.

Implikasi Emansipasi Pendidikannya adalah Ketika kebijakan tidak dijalankan secara efektif, mereka tidak responsif terhadap kebutuhan situasi lokal. Oleh karena itu, emansipasi pendidikan, yang pada teorinya mencakup pemberdayaan secara kontekstual, sangat sulit dicapai ketika kebijakan hanya dirumuskan tanpa memberikan dampak nyata pada masyarakat.

Hambatan Sosio-Kultural dan Persepsi terhadap Pendidikan

Salah satu alasan mengapa emansipasi pendidikan masih berkembang lambat adalah sistem nilai sosio-kultural yang membentuk sikap terhadap pendidikan. Di beberapa masyarakat, terutama di beberapa daerah pinggiran, pendidikan masih belum dianggap sebagai sesuatu yang menjadi prioritas. Budaya kerja anak, norma gender yang menugaskan peran domestik kepada gadis-gadis muda, dan persepsi

bahwa pendidikan formal bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan penghidupan, memperpanjang hambatan pendidikan anak. Norma-norma sosial semacam itu sering mendorong anak keluar dari sistem pendidikan formal untuk bekerja, memasuki pernikahan dini, atau membantu keluarga, yang mencegah mereka mencapai tingkat pendidikan lebih lanjut. Pandangan semacam itu memperkuat ketidaksetaraan sosial yang pada akhirnya menghalangi emansipasi pendidikan untuk generasi berikutnya (John, 2025).

Implikasinya untuk Emansipasi Pendidikan adalah Ketika pendidikan tidak dipandang sebagai investasi untuk masa depan atau alat pemberdayaan, juga terdapat kurangnya minat dari masyarakat. Praktik sosio-kultural yang masih mengutamakan kebutuhan jangka pendek di atas hak anak untuk mendapatkan pendidikan, emansipasi pendidikan sebagai sebuah proses transformasional sosial menjadi sangat terhambat.

Dampak Belum Terwujudnya Emansipasi Pendidikan terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

Kurangnya emansipasi dalam pendidikan di Indonesia bukan hanya masalah akses atau kualitas pendidikan; hal ini juga memiliki implikasi yang luas pada kehidupan sosial ekonomi dan mobilitas orang-orang secara umum. Emansipasi pendidikan yang ideal berarti menciptakan situasi di mana setiap orang memiliki akses yang sama dan adil terhadap pendidikan berkualitas dan, pada akhirnya, dapat memanfaatkan pendidikan tersebut untuk mencapai tingkat keberlangsungan ekonomi yang lebih tinggi secara berkelanjutan, serta mempertahankan kesejahteraan sebuah keluarga dan komunitas (Susanto et al., 2025). Ketika proses tersebut tidak berfungsi sepenuhnya, konsekuensinya ditanggung tidak hanya oleh individu dan keluarga mereka, tetapi juga oleh seluruh struktur sosial dan perkembangan ekonomi bangsa (Cahyani, 2024).

Studi penelitian dan laporan telah menunjukkan bahwa kurangnya akses pendidikan dan rendahnya peluang pendidikan berkualitas memiliki dampak signifikan pada sejumlah dimensi penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, dampak dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat pada mobilitas sosial, yang stagnan. Dalam hal ini, seseorang dari kelas ekonomi yang lebih miskin tidak mampu meningkatkan status sosial mereka karena kurangnya peluang pendidikan. Hal ini memperburuk siklus kemiskinan antargenerasi yang memperlebar kesenjangan struktur sosial. Misalnya, studi telah menunjukkan bahwa kurangnya akses pendidikan dan kondisi ekonomi sebuah keluarga berdampak negatif pada mobilitas sosial sebuah komunitas di beberapa daerah studi kasus di Indonesia (Hanafi & Jafar, 2025).

Selain itu, kurangnya pendidikan yang setara memiliki konsekuensi pada kualitas sumber daya manusia. Ketika pendidikan gagal mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan, mereka menghadapi hambatan besar dalam bersaing di pasar kerja. Kondisi ini mengarah pada tingkat pengangguran yang tinggi, upah rendah bagi pekerja terdidik, dan meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga. Ini sejalan dengan tinjauan literatur yang menemukan bahwa ketidaksetaraan pendidikan dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi karena

mereka yang terdidik rendah cenderung berada di pekerjaan dengan bayaran rendah atau informal (Cahyani, 2024).

Lebih jauh, dampak ketidaksetaraan pendidikan jelas terlihat dalam ketidaksetaraan sosial dan ketidaksetaraan peluang dalam kehidupan. Ketika terdapat pendidikan berkualitas rendah dan kurangnya akses terhadap pendidikan berkelanjutan, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan stabil menjadi berkurang. Ini mengarah pada peningkatan kesenjangan sosial antara yang terdidik dan yang tidak terdidik, antara perkotaan dan pedesaan, serta antara pendapatan tinggi dan rendah. Kesenjangan semacam itu tidak hanya menciptakan jurang dalam peluang kerja yang tersedia, tetapi juga datang dengan perbedaan yang kuat dalam akses terhadap layanan kesehatan penting, informasi, dan partisipasi sosial yang sehat. Ketidakhadiran ketidaksetaraan pendidikan dapat mengubah produktivitas nasional dan pertumbuhan makroekonomi secara keseluruhan (Cahyani, 2024). Kesenjangan pendidikan menghalangi suatu negara untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan inovatif yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan bangsa untuk tumbuh secara ekonomi.

Distribusi pendidikan yang tidak seimbang juga menghasilkan dimensi kesehatan dan perilaku yang berbeda dalam sistem sosial. Hasil penelitian internasional menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dari rata-rata sistem memiliki risiko tinggi terlibat dalam perilaku yang merugikan kesehatan, yang mengarah pada kesehatan kronis yang buruk, kematian dini, dan literasi kesehatan yang rendah, pada periode berikutnya (Budi, 2024). Ini menggambarkan bahwa pendidikan berdampak pada kehidupan dan kesehatan individu.

Dampak partisipasi sosial dan pemberdayaan politik juga sama pentingnya. Akses pendidikan yang tidak seimbang melemahkan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian proses demokrasi dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Kelompok sosiodemografis yang lebih rendah, sebagai yang kurang beruntung, dalam kehidupan sosial dan publik yang marginal, rentan terhadap ketidakadilan dalam aspek kehidupan publik yang tidak setara secara sosial dan politik. Bagian dari sistem sosial dan ruang publik, pendidikan adalah dasar bagi demokrasi, yang bersifat partisipatif (Susanto et al., 2025). Pendidikan inilah yang harus lebih luas, untuk menyelesaikan sepenuhnya potensi sosial, demokrasi.

Dalam studi khusus tentang ketidakadilan pendidikan menunjukkan dari tingkat dasar hingga menengah bahwa akses pendidikan yang tidak adil memperdalam ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah yang tidak menerima pendidikan berkualitas cenderung kurang berkembang keterampilan akademik dan non-akademik mereka, yang pada gilirannya, mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, ketidakadilan ini berdampak negatif pada mobilitas sosial karena peluang untuk meningkat secara ekonomi melalui pendidikan semakin terbatas (Cahyani, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Terjadi banyaknya kendala struktural dan kultural, sehingga, emansipasi pendidikan di Indonesia belum dapat dioptimalkan, diantaranya ialah, ketimpangan akses pendidikan paut, terkendala geografis dan infrastruktur, hambatan sosial ekonomi keluarga, pendidikan yang terdistribusi secara merata, dan kebijakan pendidikan yang dipaksakan lemah. Sosiokultural pendidikan masih rendah. Beberapa faktor di atas, sangat berpotensi menciptakan kendala sistemik, di mana, pendidikan sebagai alat penguasaan dan pembebasan sosial, tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.

Kegagalan pembebasan pendidikan secara serius mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi seluruh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terhambatnya penurunan dan kenaikan sosial. Ini, pada gilirannya, mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang mengarah pada berkurangnya peluang kerja yang tersedia, dan meningkatkan ketidaksetaraan sosial. Selain itu, ada juga penurunan partisipasi komunitas sosial dalam demokrasi yang mengarah pada lethargy komunitas sosial dalam demokrasi. Ini menunjukkan kegagalan pembebasan pendidikan dan dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan struktural dan menghambat pembangunan sosial yang adil dan berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan perlu memperkuat sinergi dalam mewujudkan emansipasi pendidikan yang merata dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan wilayah tertinggal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemerataan infrastruktur dan tenaga pendidik, penguatan pelaksanaan kebijakan dan bantuan pendidikan agar tepat sasaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan keluarga akan pentingnya pendidikan sebagai sarana pemberdayaan sosial dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih kontekstual dan mendalam untuk mendukung perumusan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Annet, K. A. (2024). The Role of Government in Promoting Educational Equity. *Research Output Journal of Education*, 4(3), 46–50.
- Budi, M. I. G. (2024). Correspondence The influence of disparities in education on quality of life: A review of Indonesia ' s SDGs. *Journal of Public Health*, 47(1), 2023–2024.
- Cahyani, D. (2024). The Inequality In Access To Education Especially In Elementary Schools. *Civic Engagement and Social Education Journal*, 1(1), 271–278.
- Danurwendo, Y. S., & Haryanto, S. (2025). Strategies For Equalizing Educational Access And Social Justice For Underprivileged Communities in Indonesia. *The 4th International Conference on Education Innovation and Social Science*, 1(August), 237–242.
- Hanafi, A., & Jafar, N. (2025). The Impact of Inequality in Access to Education and Family Economic Conditions on Social Mobility: A Case Study in Pangkep Regency. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 51(7), 689–696.

- Izzati, N., Maulana, A. R., & Bashith, A. (2025). Perkembangan kualitas guru dan tenaga kependidikan di sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 492–500. <http://repository.uin-malang.ac.id/24601/>
- John. (2025). *Top Barriers to Education in Indonesia: Challenges for 2025*. IPGCE. <https://www.ipgce.com/top-barriers-to-education-in-indonesia-challenges-for-2025/?utm>
- Kawakip, A. N. (2011). Paradigma sekolah unggul dalam perspektif teori Multiple Intelligences. *Jurnal Nadwa*, 5(1), 141–155. <http://repository.uin-malang.ac.id/6014/>
- Khatami, M. Y. (2025). *Sekolah Rakyat 2025: Menjembatani Jurang Ketimpangan Pendidikan*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/muhammad-yusuf-khatami-1735007663044988962/sekolah-rakyat-2025-menjembatani-jurang-ketimpangan-pendidikan-24zwN2bFUNg?utm>
- Muchtar, C. O., Purba, A. A., Sintya, J., Siagian, M. F., Harahap, N. M., Ginting, R. A., Bangun, M. B., & Muchtar, Z. (2025). Systematic Literature Review: Examining Indonesia ' s Educational Inequality Factors and Government Equity Policies. *International Journal of Educational Practice and Policy*, 3(1), 8–16. <https://doi.org/10.61220/ijepp.v3i1.0257>
- Putri, R. A. (2024). *Beranda Tentang Kami Produk Hukum Berita & Artikel Informasi & Layanan Publik Pendidikan di Wilayah Terpencil: Tantangan Pemerintah dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rahardjo, M. (2007). *Sosiologi pedesaan: Studi perubahan sosial*. UIN-Malang Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1111/>
- R.Madhakomala, Ayu, P. P., Septiani, T., & Butarbutar, P. H. (2025). Education for All: A Systematic Analysis of Equity Policies and Challenges in Indonesia. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHES)*, 4(4), 1706–1717.
- ShepnaGiantama, M., Nurjannah, S., & Rahmawati, D. (2024). Problems of Education Based on 21st Century Education in Indonesia. *Jurnal Mnajemen Pendidikan (JMP)*, 15(1), 73–80.
- Susanto, T. T. D., Malyka, A., Fauzi, H., Faradisa, N., Rifatul, N., & Malfanda, T. (2025). Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3282–3288.
- Wirawati, S. M., Parancika, R. B., Aris, M., Ahmad, I., & Gymnastiar. (2024). Transformative Education Policies Bridging The Gap Between Theory And Practice in Rural Indonesia. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)*, 1(2), 38–49.
- Yulianingsih. (2024). *Ketimpangan Akses Pendidikan: Anak dari Keluarga Miskin Terkendala Biaya*. Kumparan.Com
- Zaidah, A., & Parozak, M. rudi gunawan. (2025). Mobilitas Sosial dan Ketimpangan: Kajian tentang Akses Pendidikan sebagai Instrumen Perubahan Status. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 4(5), 486–492.

Zani, N. R., & Rahayu, S. (2022). The Education Care Community as Solution for Education Inequality in West Sumatera within Post-Covid Times. *SentriS Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 3(1), 49–60.